

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Asmara. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 23–26.
- Abdussamad Zuchri. (2021). *Metod Penelitian Kualitatif* (M. S. Dr. Patta Rapanna, SE. (ed.); Cetakan Pe). CV. syakir Media Press iii.
- Anna M dan Sugiono A. (2022). Evaluasi Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 172–186. <https://jipied.org/index.php/JSE>
- Anwar et al. (2022). Penggunaan Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Dalam Perusahaan. *Journal of Educational and Language Research*, 1(8), 1083–1096.
- Balqis N. (2023). *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan HIV-AIDS di Indonesia* (Suci Rahmadani & Ahmad Khanafi (ed.)). deepublish.
- Burhanudin et al. (2019). Manajemen Dan Eksekutif. *Manajemen*, 8(5), 55.
- Campbell, M., Escobar, O., Fenton, C., & Craig, P. (2018). The impact of participatory budgeting on health and wellbeing: A scoping review of evaluations. *BMC Public Health*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5735-8>
- Darim, A. (2020). Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 22–40. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.29>
- Handayani, M., Faradilla, C., & Farlian, T. (2022). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Penetapan Sistem Akuntansi Pemerintah*. 2, 131–144.
- Indar et al. (2021). Analisis Perilaku Legislator Dalam Perencanaan Kesehatan Di Kabupaten Bantaeng Analysis of Legislator Behavior in Health Planning at Bantaeng Regency. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr.Soetomi, Vol.7 No.*, 334–343. [www.jurnal.stiks-yrsds.ac.id](http://www.jurnal.stiks-yrsds.ac.id)
- Indar, P. H. (2022). *Kapita Selekta Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Book* (1st ed.).
- Irmanto, A., & Ridwan, M. (2021). Analisis Tentang Pentingnya Rencana Strategis Organisasi (Analysis of the Importance of Organizational Strategic Plans ). *International Journal of Indragiri*, 1(1), 1–7.
- Iswarno, Hasanbasri, M., & Lazuardi, L. (2013). Analisis Stakeholder dalam Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 02(02), 77–85. [http://jurnal.kebijakankesehatanindonesia.net/images/PDF\\_Volume/vol-2-2013/Juni\\_2013/04\\_Iswarno.pdf](http://jurnal.kebijakankesehatanindonesia.net/images/PDF_Volume/vol-2-2013/Juni_2013/04_Iswarno.pdf)

- Kelvin A. (2022). Pengaruh perilaku Dan Partisipasi Aparat Terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 11(1), 1–13. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/akademika%0APENGARUH>
- Kemendes & Kementerian PPN. (2022). *Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedepuitian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, 2022* (Cetakan Pe). Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- Kurnia et al. (2021). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Rancangan Rkpd Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(7), 99–112. <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/477%0Ahttps://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/download/477/262>
- Maryanto, Sasmito, C., & Rifa'i, M. (2019). Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)(Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 74–85.
- Mbachu, C., Okeke, C., Obayi, C., Gatome-Munyua, A., Olalere, N., Ogonna, I., Uzochukwu, B., & Onwujekwe, O. (2021). Supporting strategic health purchasing: a case study of annual health budgets from general tax revenue and social health insurance in Abia state, Nigeria. *Health Economics Review*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s13561-021-00346-8>
- Nurannafi. (2018). Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Nurhayati et al. (2019). Perilaku Oportunistik dan Konflik Internal dari Pelaku Anggaran dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Bima. *Seminar Nasional Taman Siswa Bima Tahun*, 77–84. <http://semnas.tsb.ac.id/index.php/semnastsb2019/index>
- Palutturi. (2021). Kepemimpinan Dan Berpikir Sistem. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (1st ed., Vol. 1, Issue April).
- Palutturi. (2023). *Palutturi\_Politik Kesehatan\_2023.pdf*.
- Peraturan Presiden RI. (2012). *Peraturan Presiden UU No 72* (pp. 66–71). <http://www.bphn.go.id/data/documents/12pr072.pdf>
- Permendagri 86. (2017). *Permendagri 86 Th 2017*.
- Profil Dinkes. (2021). Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar 2021. In *Data Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar*.
- Ramadhan, A. (2012). Interaksi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif (Studi tentang proses penyusunan dan penetapan APBD bidang pembangunan tahun 2012 di Kabupaten .... *Jurnal Politik Muda Vol*, 94–107.

- Ramadhani. (2019). Jaringan Komunikasi Politik yang Dipilih Kepala Daerah dalam Proses Perumusan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2019. *ETTISAL : Journal of Communication*, 5(1), 2–3. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3948>
- RENSTRA DINKES KOTA MAKASSAR 2021-2026, (2021).
- Riharjo dan Isnadi. (2010). Perilaku Oportunistik Pejabat Esekutif Dalam Penyusunan APBD (Bukti Empiris atas Penggunaan Penerimaan Sumber Daya Alam). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 14(3), 389. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2010.v14.i3.2180>
- Saputra et al. (2020). Pengaruh DAU, PAD, Jenis Dan Letak Pemerintahan Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.33772/jpep.v5i1.11750>
- Sarmolina et al. (2018). Analisis Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Indragiri Hulu. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 26(4), 88–101.
- Sidin, A. I., & Della, R. H. (2020). Perilaku Organisasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [https://repository.unsri.ac.id/53105/1/Perilaku Organisasi Revisi Final.pdf](https://repository.unsri.ac.id/53105/1/Perilaku%20Organisasi%20Revisi%20Final.pdf)
- Silva, C. P., & Sousa, R. M. de. (2021). Budgetary restrictions and ethical behaviours in a hospital context – evidence from general surgeons. *European Journal of Management Studies*, 26(1), 17–32. <https://doi.org/10.1108/ejms-01-2021-0006>
- Suprpto dkk. (2023). Kebijakan Kesehatan. In *Bulletin Penelitian Sistem Kesehatan* (p. 257).
- Tenriawi et al. (2018). *Analisis Perilaku Legislator Dalam Perencanaan Kesehatan Di Kabupaten Takalar Tahun 2018*.
- Tewal. (2017). *Perilaku Organisasi Book*.
- Utama, P. (2020). *Perilaku Organisasi. Book*.
- Utami, D. F. (2021). Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021. *JPASDEV: Journal of Public Administration and ...*, 2(1), 56–73. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapura/article/view/46979%0Ahttps://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapura/article/download/46979/75676589934>
- Wijaya, C. (2017). Perilaku individu organisasi. In *Lembaga Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Medan*. [www.lpppindonesia.com](http://www.lpppindonesia.com)
- Yuhertiana, I., Pranoto, S., & Priono, H. (2015). Perilaku disfungsional pada siklus penganggaran pemerintah: Tahap perencanaan anggaran. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 25–38. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art3>

# LAMPIRAN

**INFORMED CONSENT**  
**(PERNYATAAN PERSETUJUAAN INFORMAN)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan dan mengikuti proses penelitian hingga selesai. Peneliti telah memberikan penjelasan tentang tujuan dan proses penelitian yang berjudul “Analisis Perilaku Eksekutif Dalam Perencanaan Anggaran Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kota Makassar” yang dilakukan oleh Murniaty M NIM K052221007 sehingga saya dengan sukarela menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat persetujuan menjadi informasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, serta tanpa paksaan dan pihak manapun.

Makassar, Agustus 2023

Informan

(.....)



## PEDOMAN WAWANCARA

### Identitas Responden

Nama :  
 Umur :  
 Jenis Kelamin :  
 Pendidikan :

### Riwayat Pekerjaan

Bagian Kerja :  
 Masa Kerja :

### 1) Perilaku Komunikasi eksekutif dalam perencanaan anggaran kesehatan

- :
- a. Pendekatan Partisipatif
 

Probing :

    1. Tahapan Komunikasi
    2. Proses Komunikasi
    3. Perencanaan anggaran kesehatan
  - b. Pendekatan Politis
 

Probing :

    1. Kebijakan Penetapan Anggaran
    2. Usulan Program kegiatan
  - c. Pendekatan Atas Bawah – Bawah Atas
 

Probing :

    1. Musyawarah dari struktural organisasi
    2. Sosialisasi Program dan anggaran

### 2) Perilaku Politik eksekutif dalam perencanaan anggaran kesehatan

- a. Pendekatan Partisipatif:
 

Probing:

  1. Kerjasama lintas sektoral

2. Partisipasi komperenshif
  - b. Pendekatan Politis:
    - Probing :
      1. Kerjasama eksekutif – legislatif
      2. Kebijakan program dan anggaran
  - c. Pendekatan Atas Bawah – Bawah Atas
    - Probing :
      - 4.3.1.1.1.1 Rekomendasi
      - 4.3.1.1.1.2 Kontribusi *Stakeholder*
- 3) Perilaku Negosiasi eksekutif dalam perencanaan anggaran Kesehatan**
- a. Pendekatan Partisipatif
    - Probing :
      1. Negoisasi dengan Lintas sektor terkait
      2. Kebijakan
  - b. Pendekatan Politis :
    - Probing :
      1. Bentuk negoisasi dengan legislatif
  - c. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas
    - Probing:
      1. Proses negoisasi

## REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

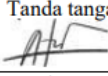


*Jln. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658,  
E-mail : [fkm.unhas@gmail.com](mailto:fkm.unhas@gmail.com), website: <https://fkm.unhas.ac.id/>*

### REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor: 4512/UN4.14.1/TP.01.02/2023

Tanggal: 23 Juli 2023

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No.Protokol	14723012132	No. Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	<b>Murniaty M</b>	Sponsor	Pribadi
Judul Peneliti	<b>Analisis Perilaku Eksekutif dalam Perencanaan Anggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Makassar</b>		
No.Versi Protokol	1	Tanggal Versi	14 Juli 2023
No.Versi PSP	1	Tanggal Versi	14 Juli 2023
Tempat Penelitian	<b>Dinas Kesehatan Kota Makassar</b>		
Judul Review	<input type="checkbox"/> Exempted <input checked="" type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard	Masa Berlaku <b>23 Juli 2023 Sampai 23 Juli 2024</b>	Frekuensi review lanjutan
Ketua Komisi Etik Penelitian	Nama : Prof.dr.Veni Hadju,M.Sc,Ph.D	Tanda tangan 	Tanggal 23 Juli 2023 
Sekretaris komisi Etik Penelitian	Nama : Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes	Tanda tangan 	Tanggal 23 Juli 2023 

Kewajiban Peneliti Utama :

1. Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
2. Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
3. Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
4. Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
5. Melaporakn penyimpangan dari protocol yang disetujui (protocol deviation/violation)
6. Mematuhi semua peraturan yang ditentukan



## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp.(0411) 585658,  
e-mail : fkm.unhas@gmail.com, website: https://fkm.unhas.ac.id/

Nomor : 23590/UN4.14.1/PT.01.04/2023

25 Juli 2023

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Selatan  
di Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, yang tersebut di bawah ini:

Nama : Murniaty M  
NIM : K052221007  
Program Pendidikan : S2  
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul "**Analisis Perilaku Eksekutif Dalam Perencanaan Anggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Makassar**" yang dibimbing oleh:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Indar, SH., MPH  
Pembimbing II : Dr. Balqis, SKM., M.Sc.PH., M.Kes  
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPKAD, BAPPEDA, BANGGAR  
Waktu Penelitian : 27 Juli - 30 September 2023

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan



Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes.  
NIP.197604072005011004

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan FKM-UNHAS
2. Ketua Program Studi AKK FKM-UNHAS
3. Pertinggal

## SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 22057/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 23590/UN4.14.1/PT.01.04/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MURNIATY M
Nomor Pokok	: K052221007
Program Studi	: Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" ANALISIS PERILAKU EKSEKUTIF DALAM PERENCANAAN ANGGARAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Juli s/d 30 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 26 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 22057/S.01/PTSP/2023

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20230725597708



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



## SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
 Website: [dpmpstp.makassarkota.go.id](http://dpmpstp.makassarkota.go.id)



### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/49/SKP/SB/DPMPSTP/8/2023

#### **DASAR:**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- d. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- e. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/49/SKP/SB/DPMPSTP/8/2023, Tanggal 26 Juli 2023
- f. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 070/039/SKP-SB/BKBP/8/2023

#### **Dengan Ini Menerangkan Bahwa :**

Nama	: MURNIATY M
NIM / Jurusan	: K052221007 / Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampir,-
Waktu Penelitian	: 27 Juli 2023 - 30 September 2023
Tujuan	: Tesis
Judul Penelitian	: "ANALISIS PERILAKU EKSEKUTIF DALAM PERENCANAAN ANGGARAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- b. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- c. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
- d. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



**Ditetapkan di Makassar**

**Pada tanggal: 2023-08-06 18:57:08**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**

Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
2. Peringgal,-

Lampiran Surat Keterangan Penelitian sdr(i) MURNIATY M dengan nomor surat  
070/49/SKP/SB/DPMPSTSP/8/2023

Lokasi Penelitian:

1. DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR
3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR
4. SEKERTARIS DPRD KOTA MAKASSAR

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN****PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN****Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar****SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN****No surat : 440/10/PSDK /X/2023**

Bersama dengan surat ini menerangkan bahwa :

**Nama** : **Murniaty M**  
**NIM** : **K052221007**  
**Jurusan** : **S2 Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK)**  
**Institut** : **Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar**  
**Tanggal Penelitian** : **27 Juli 2023 – 30 September 2023**

**Judul** : **Analisis Perilaku Eksekutif dalam Perencanaan Anggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Makassar**

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di kantor Dinas kesehatan Kota Makassar Propinsi Sulawesi selatan.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 3 Oktober 2023  
an. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar  
Sekretaris

**drg. Ita Isdiana Anwar, M. Kes**  
Pangkat : Pembina TK I / IV B  
NIP : 19680829 200604 2 006

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jalan Jenderal Achmad Yani Makassar No. 2 90111 Telp (0411) 3616940

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nnomor : 050.13/1103 /K/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : MURNIATY M  
 NIM /Jurusan : K052221007 / Administrasi dan Kebijakan Kesehatan  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS  
 Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, mulai tanggal 27 Juli s/d 30 September 2023 dengan Judul :

**“ANALISIS PERILAKU EKSEKUTIF DALAM PERENCANAAN ANGGARAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR”**

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Oktober 2023

a.n Kepala Badan,

  
  
**Dra. H. MURNIATI, M.Si**  
 Pemimpin Tk.I/ IV.b  
 Nip.19651221198603201

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN****PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Telp. (0411) 3633700-3615450, Fax. (0411) 3633700  
MAKASSAR 90111

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 070/1827/BPKAD/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MUH. DAKHLAN, M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Menerangkan bahwa Mahasiswa/i Perguruan Tinggi yang bernama:

Nama : **MURNIATY M**  
NIM : **K052221007**  
Jurusan : **Administrasi dan Kebijakan Kesehatan**  
Perguruan Tinggi : **Universitas Hasanuddin**  
Tanggal Pelaksanaan : **27 Juli 2023 s/d 30 September 2023**

Benar telah melakukan penelitian / pengumpulan data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, dalam rangka penyusunan S

Skripsi/Tesis dengan judul : **"ANALISIS PERILAKU EKSEKUTIF DALAM PERENCANAAN ANGGARAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN"**.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 05 Oktober 2023  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Kota Makassar



**ISWADY, SE, M.Si.**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19790321 199803 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



### PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Jl. Andi Pangerang Pettarani Blok E. No. 1-2 Telp. 868296 - 868909 - 880863 Fax. 882455 Makassar 90222  
E-mail : [dprd\\_@makassar.go.id](mailto:dprd_@makassar.go.id) Homepage : <http://www.makassar.go.id>

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 1658/Sek.DPRD/070/X/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. MUHAJIR, S.K.M.,M.Si**  
N i p : 19740517 199503 1 003  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I ( IV/b )  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Instansi : Sekretariat DPRD Kota Makassar

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MURNIATY M  
Nomor Pokok : K052221007  
Jurusan : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)  
Kampus : UNIVERSITAS HASANUDDIN (UNHAS)

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan Judul “ANALISIS PERILAKU EKSEKUTIF DALAM PERENCANAAN ANGGARAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR”. Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Oktober 2023

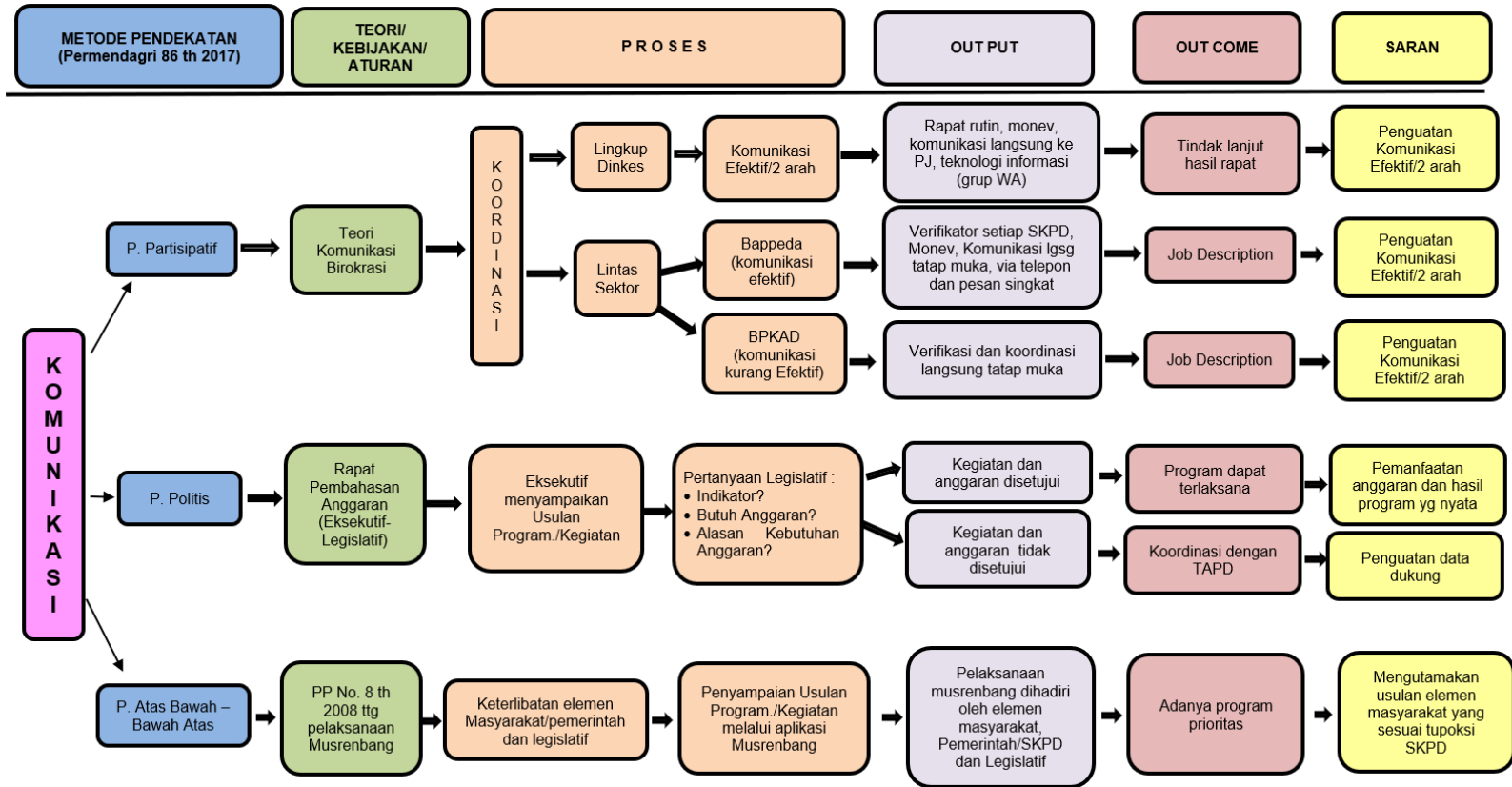
An. SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR  
KEPALA BAGIAN UMUM

  
**Dr. MUHAJIR, S.K.M.,M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP. 19740517 199503 1 003

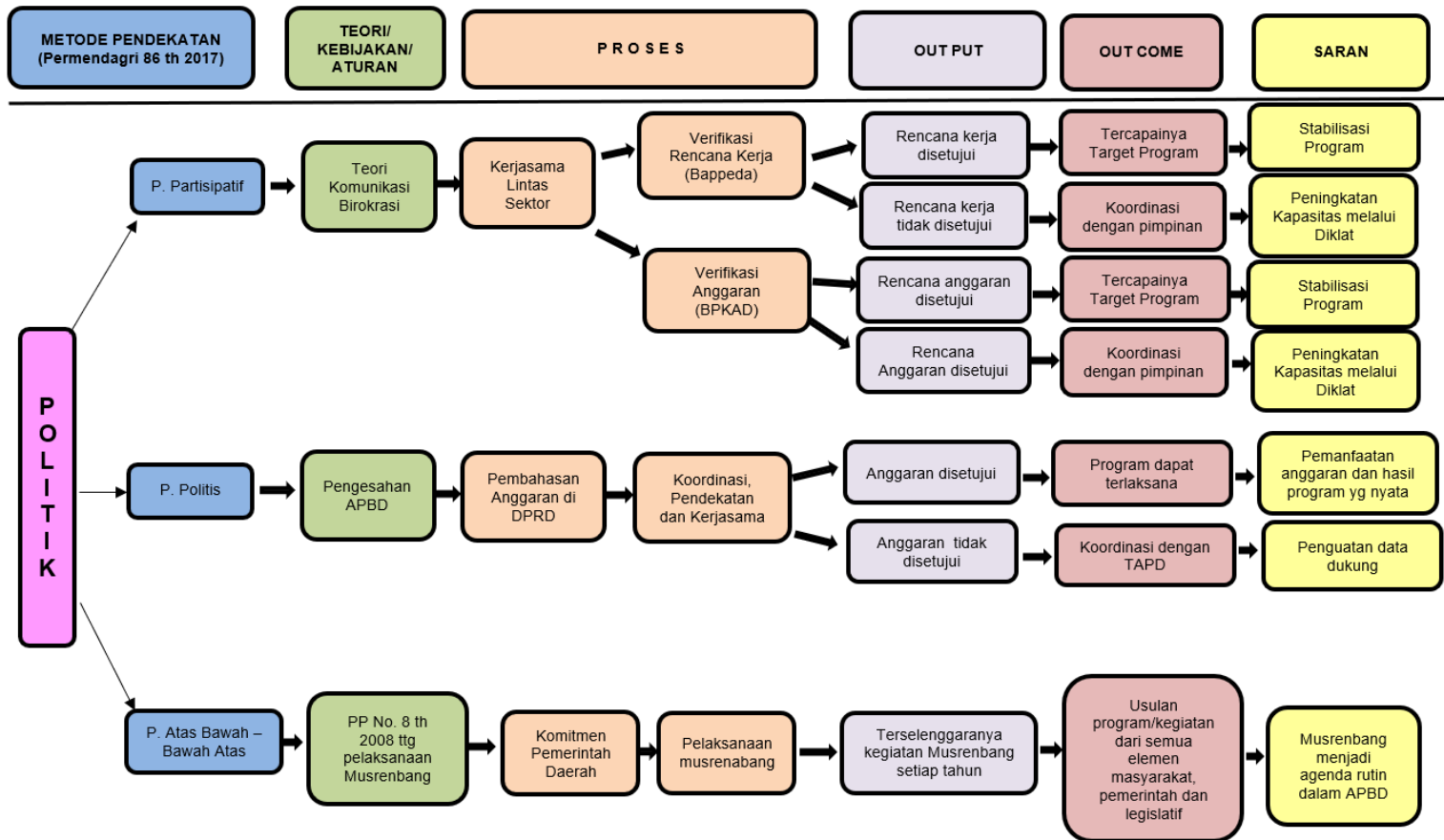
**Tabel 1. Matriks metode wawancara dan pengumpulan data**

No	VARIABEL	INFORMAN		METODE	
		KODE INFORMAN	BIDANG/INSTANSI	WM (Wawancara Mendalam)	TD (Telaah Dokumen)
1	<b>KOMUNIKASI</b>				
	A. Partisipatif	IMD	Perencanaan /Dinkes	✓	✓
	B. Politis	USW	Keuangan/Dinkes	✓	
	C. Atas bawah-bawah atas	AAZ	Pelayanan Kesehatan/Dinkes	✓	
		AMR	Pengendalian Penyakit/Dinkes	✓	
		NPI	Sosial Budaya/Bappeda	✓	
		MFA	Pengendalian p/BPKAD	✓	
		MIS	Anggaran/BPKAD	✓	
		AHI	Banggar/DPRD	✓	
	<b>Total</b>	<b>8 Orang Informan</b>			
2	<b>POLITIK</b>				
	A. Partisipatif	IMD	Perencanaan /Dinkes	✓	
	B. Politis				
	C. Atas bawah-bawah atas	USW	Keuangan/Dinkes	✓	
		AAZ	Pelayanan Kesehatan /Dinkes	✓	
		AMR	Pengendalian Penyakit/Dinkes	✓	

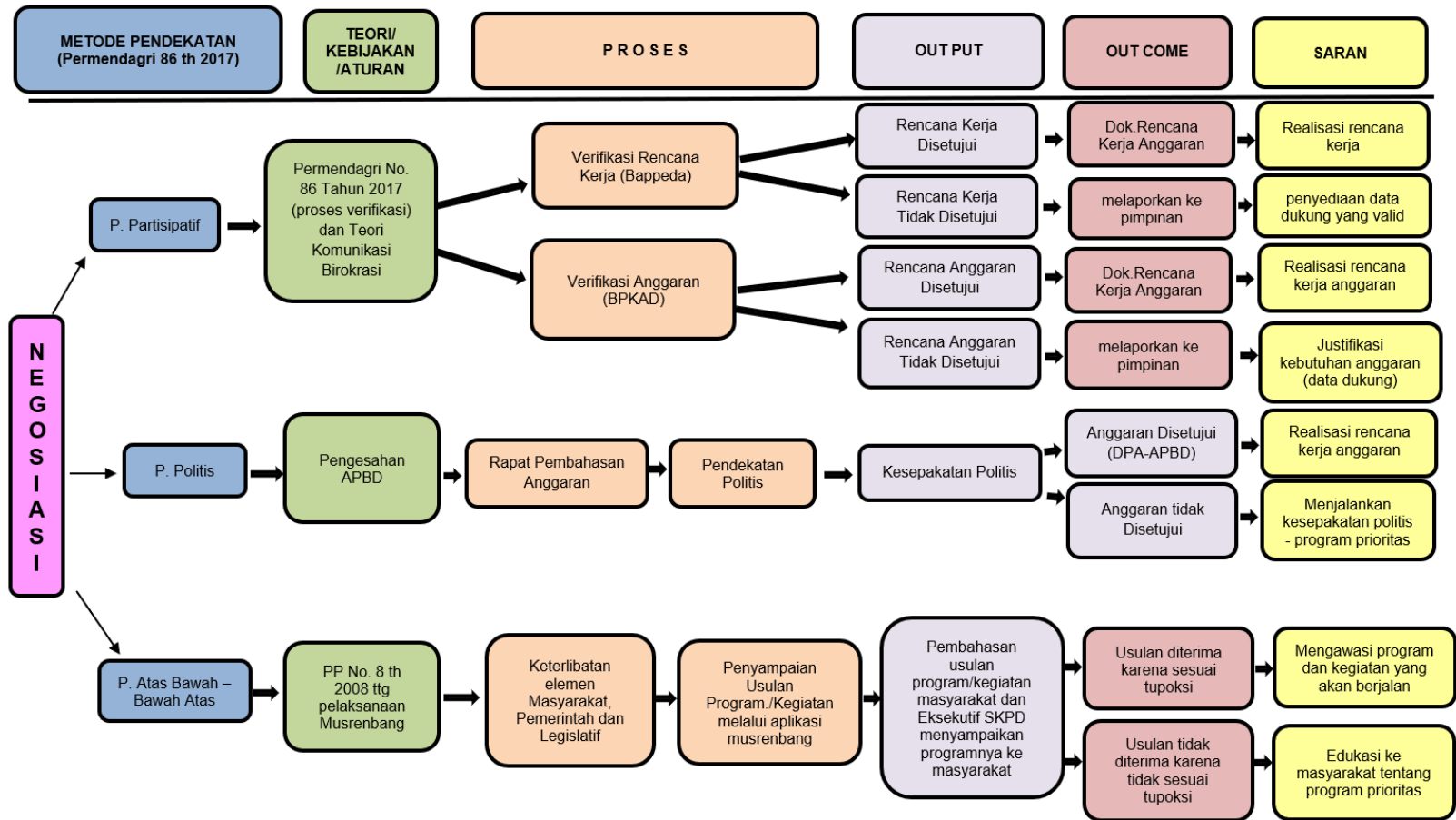
		<b>NPI</b>	<b>Sosial Budaya/Bappeda</b>	✓	
		<b>MFA</b>	<b>Pengendalian Anggaran/BPKAD</b>	✓	
		<b>MIS</b>	<b>Anggaran/BPKAD</b>	✓	
		<b>AHI</b>	<b>Banggar/DPRD</b>	✓	
	<b>Total</b>	<b>8 Orang Informan</b>			
<b>3</b>	<b>NEGOSIASI</b>				
	<b>A. Partisipatif B. Politis C. Atas bawah-bawah atas</b>	<b>IMD</b>	<b>Perencanaan /Dinkes</b>	✓	✓
		<b>USW</b>	<b>Keuangan/Dinkes</b>	✓	
		<b>AAZ</b>	<b>Yankes/Dinkes</b>	✓	
		<b>AMR</b>	<b>P2/Dinkes</b>	✓	
		<b>NPI</b>	<b>Sosial Budaya/Bappeda</b>	✓	
		<b>MFA</b>	<b>Pengendalian Anggaran/BPKAD</b>	✓	
		<b>MIS</b>	<b>Anggaran/BPKAD</b>	✓	
		<b>AHI</b>	<b>Banggar</b>	✓	
	<b>Total</b>	<b>8 Orang Informan</b>			



Gambar 1. Skema perilaku eksekutif dalam perencanaan anggaran kesehatan (komunikasi)



Gambar 2. Skema perilaku eksekutif dalam perencanaan anggaran kesehatan (politik)



Gambar 3. Skema perilaku eksekutif dalam perencanaan anggaran kesehatan (negosiasi)

**Tabel 2. Matriks hasil pernyataan informan dalam konsep emik dan konsep etik**

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
1	<b>Komunikasi (Pendekatan Partisipatif)</b>	<b>1.Tahapan Komunikasi</b>	<p>IMD, 40 th</p> <p>USW, 42 th</p>	<p><i>komunikasinya antar dinkes termasuk UPTD yakni Puskesmas dan RS sangat terbantu dengan adanya media sosial (grup WA), selain itu ada rapat koordinasi rutin dengan Kepala Puskesmas dan pejabat struktural RS, sedangkan untuk bidang di Dinkes ada monev triwulan, rapat koordinasi rutin dengan kepala dinas senin pagi habis apel..awalnya setiap minggu, tapi karena padat kesibukan akhirnya sekali sebulan</i></p> <p><i>keuangan mendukung semua kegiatan perencanaan..komunikasi dengan Puskesmas ada grup WA sesama bendahara/PPTK termasuk rapat koordinasi sebulan sekali dengan Puskesmas dan tingkat dinkes ada rapat koordinasi dan monev (wajib paparan realisasi fisik dan keuangan) dengan bagian perencanaan dan pimpinan..selama sesuai dengan aturan maka kami mendukung program yang diajukan</i></p>	<p>Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan pendekatan Partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan</p>	<p>Bahwa tahapan komunikasi dimulai dari tingkat UPTD yakni Puskesmas kemudian tingkat lingkup dinkes dalam bentuk rapat koordinasi rutin, monev dan bahkan memanfaatkan media sosial (grup WA)</p>

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
			AAZ, 46 th	<i>komunikasi dengan sesama Dinkes yakni adanya monev, rapat koordinasi rutin dengan semua bidang termasuk perencanaan dan kepala dinas kadang seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali dan juga ada grup WA</i>	Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan pendekatan Partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan	Bahwa tahapan komunikasi dimulai dari tingkat UPTD yakni Puskesmas kemudian tingkat lingkup dinkes dalam bentuk rapat koordinasi rutin, monev dan bahkan memanfaatkan media sosial (grup WA)  Bahwa untuk program penyakit di Bidang P2 merujuk pada Buku Pedoman dan komunikasi dengan PJ program di dinkes apabila ada kendala teknis dan sampai pada level kabid apabila tidak menemukan solusi
			AMR, 40 th	<i>program Pengendalian Penyakit kan karena semua kita sudah punya pedoman untuk semua program penyakit menular dan tidak menular, jadi adapun untuk komunikasi itu kita biasanya memaksimalkan pada pedoman yang sudah ada...kalaupun misalnya ada dari Puskesmas yang bertanya biasanya juga langsung dikomunikasikan ke pengelola program kecuali ada yang nyangkut baru ke level kabid</i>		



No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Komunikasi (Pendekatan Partisipatif)</b>	<b>2. Proses Komunikasi</b>	IMD, 40 th  NPI, 37 th	<p><i>kalau Bappeda komunikasinya lancar karena kita sudah ditunjukkan orangnya untuk dinkes..tim Bappeda pak zainal yang selalu hubungi kami...lancarnya karena jelas sapa yang kawal di bappeda dan ada orangnya jadi komunikasi jelas kemana</i></p> <p><i>kami ada tim verifikator dan komunikasi hampir semua media, face to face, kemudian media grup WA, kita punya grup tersendiri untuk perencanaan, grup tingkat kota, intens komunikasi dengan Kadis, Kabid ...rutin, Kasubag Perencanaan,,, dan hampir setiap bulan ada komunikasi dan triwulan (monitoring dan evaluasi)</i></p>	Komunikasi yang dibangun dengan bentuk interpersonal yakni komunikasi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara dan setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi.	Proses komunikasi dengan pendekatan partisipatif dianggap cukup efektif dengan adanya Penanggung Jawab/verifikator khusus menangani SKPD yang ditunjuk pada masing-masing bidang program



No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
			MIS, 40 th	<p><i>komunikasi kami dengan dinkes, lumayan maksudnya bahwa kami apabila ada perkembangan terkait program dinkes respon sangat bagus dan cepat dan juga kami tidak pernah menutup ruang komunikasi langsung dengan dinkes yakni komunikasi antar pimpinan..komunikasi kami bidang anggaran dengan teman perencanaan bahkan kadang konsultasi langsung dilakukan diluar jam kantor pun</i></p>	<p>Komunikasi langsung tatap muka dilakukan pada saat dan bahkan diluar jam kerja</p>	<p>Komunikasi bidang anggaran (BPKAD) dengan dinkes dilakukan dengan komunikasi langsung tatap muka pada saat konsultasi dan bahkan diluar jam kerja</p>

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Komunikasi (Pendekatan Politis)</b>	<p><b>1. Usulan Program Kegiatan</b></p> <p><b>2. Usulan Program Kegiatan</b></p>	<p>IMD, 40th</p> <p>AHI, 42th</p>	<p><i>Pada saat pembahasan anggaran di DPRD ..kami dinkes sudah berusaha berkomunikasi dengan meyakinkan legislatif untuk usulan program/kegiatan apabila ada kendala misalnya kurang disetujui oleh legislatif maka tindakan selanjutnya biasa kami Dinkes dalam hal ini Kepala Dinas langsung komunikasi dengan TAPD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah</i></p> <p><i>Dinkes membuat program..setelah program dibuat, dinkes menyampaikan ke kami DPRD terkait program itu dan meminta bantuan untuk dianggarkan..nanti kami panggil pembahasan Monev mereka (dinkes) untuk membacakan program kerjanya kami tanya apa indikatornya, kalau realistis maka kami akan menyetujui..biasa juga ada yang tidak di acc kalau misal terlalu tinggi penganggarannya tergantung dari kekuatan APBD kita dan asas manfaat kepada warga Kota Makassar</i></p>	<p>Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintahan Daerah) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah beserta Pejabat Perencana Daerah, PPKD yang melibatkan masyarakat yang memiliki kompetensi (akademisi)</p> <p>Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan pendekatan politis yakni perencanaan dibahas bersama dengan legislatif</p>	<p>Dinkes berusaha berkomunikasi dengan legislatif yakni dengan meyakinkan legislatif untuk setiap usulan program/kegiatan dan apabila terkendala maka tindakan selanjutnya komunikasi dengan tim TAPD</p> <p>Usulan yang telah dibuat oleh Dinkes akan disampaikan ke DPRD melalui rapat pembahasan atau Monev dan diskusi terkait indikator usulan, alasan kebutuhan anggaran</p>

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Komunikasi (Pendekatan Atas Bawah-Bawah Atas)</b>	<b>Musyawaharah dari struktural organisasi dan sosialisasi program</b>	IMD, 40 th	<i>kegiatan musrenbang yang hadir ada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pasti ada lurah, Babinkantibmas, Kader, SKPD lain, Puskesmas, narasumber Bappeda..semua SKPD menjawab apa programnya ke masyarakat semua berkesempatan untuk menyampaikan usulan sekitar 5 menit per SKPD, camat, lurah..dan selalu ada anggota dewan datang..usulan semua dari forum musrenbang dan juga ada aplikasinya musrenbang dikembangkan sama Bappeda</i>	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kegiatan musrenbang menjadi wadah bagi berbagai lapisan masyarakat untuk menyampaikan usulan program kegiatan sedangkan pemerintah dalm hal ini SKPD menyampaikan apa programnya ke masyarakat dan Bappeda mengembangkan aplikasi musrenbang dan menjadi narasumber

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
			AAZ, 46 th	<i>terkadang ada juga usulan bukan hanya dari Puskesmas tapi juga pada saat musrenbang...salah satu acuan kami untuk melakukan kegiatan jika ada kegiatan yg berhubungan dengan bidang kami pelayanan kesehatan maka kami akan laksanakan kalau memang merupakan hal urgent atau menyentuh langsung ke masyarakat dan melihat skala prioritas</i>	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Acuan bidang Pelayanan Kesehatan mengusulkan kegiatan bukan hanya dari Puskesmas akan tetapi usulan dari musrenbang dengan pertimbangan apakah merupakan hal yang mendesak, menyentuh langsung msyarakat dan skala prioritas

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Komunikasi (Pendekatan Atas Bawah-Bawah Atas)</b>	<b>Musyawaharah dari struktural organisasi dan sosialisasi program dan kegiatan</b>	AMR, 47 th	<i>kalau itu kan usulan melalui jalur musrenbang untuk masyarakat tapi semua di kelola oleh Bappeda jadi disitu biasanya kalau ada mereka usulkan jadi jalurnya dilaporkan sekarang usulan ke musrebang online untuk usulan anggaran 1 atau 2 tahun ke depan</i>	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kegiatan musrenbang menjadi wadah bagi berbagai lapisan masyarakat untuk menyampaikan usulan program kegiatan sedangkan pemerintah dalam hal ini SKPD menyampaikan apa programnya ke masyarakat dan Bappeda mengembangkan aplikasi musrenbang dan menjadi narasumber

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
			NPI, 37 th	<i>untuk kegiatan Musrenbang semua SKPD hadir termasuk anggota dewan jadi untuk usulan kami sudah ada aplikasi online nya jadi untuk usulan 2 tahun kedepan sudah bisa diinput di aplikasi sehingga memudahkan pada saat pembahasan usulan di Musrenbang</i>	Musrenbang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi online musrenbang yang juga dapat diakses oleh masyarakat dan usulan dapat disampaikan untuk 1 atau 2 tahun kedepan	Bappeda memanfaatkan mengembangkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi online untuk usulan 2 th kedepan sudah dapat disampaikan sehingga memudahkan pada saat pembahsan di musrenbang



No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
2	Politik (Pendekatan Partisipatif)	<p>1. Kerjasama lintas sektoral</p> <p>2. Kendala kerjasama</p>	<p>IMD, 40 th</p> <p>IMD, 40 th</p>	<p><i>Bentuk kerjasama kami dengan Bappeda yakni pada saat penyusunan rencana kerja yang disesuaikan dengan permendagri 86 th 2017 dan sinkronisasi dengan program prioritas pemerintah daerah</i></p> <p><i>Biasanya yang menjadi kendala pada saat verifikasi rencana kerja di Bappeda kalau ada ubah rincian kegiatan yang sebenarnya menurut kami prioritas, tapi belum terakomodir mau dirubah rincian ya urusannya mi bos sama bos yang bicara biasanya</i></p> <p><i>Begitu juga pada saat verifikasi anggaran di BKAD apabila ada kendala terkait perubahan rincian anggaran akan diarahkan ke level Kabid dan apabila tidak menemukan solusi akhirnya kami melaporkan ke Kepala Dinas biar menjadi urusan pimpinan</i></p>	<p>Rencana kerja disusun berdasarkan pedoman Permendagri 86 th 2017</p> <p>Teori komunikasi birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi untuk mencapai komunikasi organisasi yg efektif yakni salah satu karakteristiknya hirarki organisasi yang terstruktur</p>	<p>Penyusunan rencana kerja dinkes disesuaikan dengan pedoman permendagri 86 th 2017 tentang cara perencanaan pemerintah daerah dan sinkronisasi dengan program prioritas pemerintah daerah</p> <p>Masalah pada saat verifikasi kegiatan atau anggaran merupakan kendala yang dihadapi dalam kerjasama yang dilakukan dengan lintas sektor yakni masalah politis dan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah faktor kepemimpinan</p>

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Politik (Pendekatan Partisipatif)</b>	<b>3. Partisipasi komprehe nsif</b>	NPI, 37 th	<i>tugas kami Bappeda itu Bappeda menerjemahkan program kegiatan kedalam bentuk dokumen visi misi kepala daerah kemudian disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kendala utama yang dihadapi adalah adanya ketidaksinkronan target program sehingga terkadang solusi yang dilakukan adalah koordinasi antar pimpinan.</i>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun	Fungsi Bappeda mengawal dan menerjemahkan visi misi ke dalam bentuk program kegiatan yang disusun dalam dokumen dan disinkronkan dengan RPJPN dan RPJM Daerah Provinsi

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Politik (Pendekatan Politis)</b>	<b>1.Hubungan Eksekutif - legislatif</b>	<p>IMD, 40 th</p> <p>AAZ, 40 th</p>	<p><i>kami dinkes dengan legislatif selama ini hubungan kami terjalin cukup baik..biasanya akan lebih sering berkoordinasi pada saat rapat pembahasan anggaran atau monev terkait usulan program kegiatan yang menurut kami prioritas biasanya kami akan melakukan pendekatan dengan menyesuaikan dengan dapil wilayah mereka masing-masing</i></p> <p><i>pada saat rapat pembahasan di DPRD legislatif bertanya-tanya kegiatan apa ini? mereka juga melihat kegiatan apa saja yang mau dilaksanakan dan berapa besar anggaran yang digunakan serta mereka juga melihat ketersinggungan anggaran dilaksanakan oleh Dinkes dengan Dapilnya mereka.. ada pasti faktor kepentingan..tidak bisa dipungkiri ada faktor kepentingan dari Dapil wilayah kerja mereka</i></p>	<p>Koordinasi pada rapat pembahasan dan melakukan pendekatan dengan legislatif</p> <p>Persoalan kepentingan yang menjadi tujuan dalam proses legislasi dalam DPRD termasuk mengutamakan daerah pemilihan legislatif</p>	<p>Koordinasi yang dilakukan dinkes akan lebih intens ke legislatif pada saat pembahasan anggaran terkait usulan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dengan melakukan pendekatan dengan legislatif</p> <p>Pembahasan anggaran di DPRD dengan melihat kegiatan apa saja yang ingin dilaksanakan dinkes, besaran anggaran yang ingin diminta serta merujuk pada apakah terdapat ketersinggungan dengan dapil legislatif atau faktor kepentingan</p>

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Politik (Pendekatan Politis)</b>	<b>2.Kerjasama Eksekutif - legislatif</b>	<p>IMD, 40 th</p> <p>AHI, 42 th</p>	<p><i>pada saat rapat komisi apabila ada usulan kegiatan yang tidak disetujui oleh legislatif walaupun sudah melakukan pendekatan biasanya Kadis langsung ke TPAD dan apabila masih terkendala akan dilimpahkan lagi ke tingkat lebih tinggi yakni Walikota</i></p> <p><i>pemerintah dalam hal ini eksekutif harus sejalan dengan legislatif, mengadakan kolaborasi yang baik dengan mengajukan program-program yang baik pula khususnya pada jenis pelayanan kesehatan seperti RS dan Puskesmas...dalam hal ini walikota sebagai pengambil kebijakan mesti memegang peran dalam pengambilan keputusan</i></p>	<p>Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi untuk mencapai komunikasi organisasi yg efektif yakni salah satu karakteristiknya hirearki organisasi yang terstruktur</p> <p>Komunikasi efektif (diskusi 2 arah) dan teori kolaborasi <i>Barbara Gray</i> tentang pentingnya meningkatkan kolaborasi antar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan</p>	<p>Setiap usulan program harus sesuai dengan program prioritas dan indikator SPM prioritas sehingga untuk usulan yang disusun oleh eksekutif terkendala dengan anggaran akan dilimpahkan ke TAPD sampai ke tingkat Walikota</p> <p>Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama dan berkolaborasi sehingga akan menghasilkan program yang lebih bermanfaat ke masyarakat khususnya pelayanan kesehatan dan walikota memiliki peran penting</p>

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Politik (Pendekatan Atas Bawah – Bawah)</b>	<b>3.Komitmen, Rekomendasi dan Keputusan Stakeholder</b>	IMD, 40 th	<p><i>Kegiatan murenbang rutin dilaksanakan tiap tahun mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota dan menjadi komitmen pemerintah kota untuk dianggarkan di APBD..</i></p> <p><i>semua usulan masuk dari peserta yang hadir pada saat forum musrenbang..termasuk anggota legislatif yang hadir dan belum kalau mereka marah-marah sudah 4 tahun diusulkan tapi tidak didengarkan..ada aplikasinya untuk usulan dari forum musrenbang jadi bisa dilihat usulannya diakomodir kah atau tidak.. dan jadi pertimbangan stakeholder untuk mengusulkan kegiatan atau program dengan mempertimbangkan kebutuhan Puskesmas dan Rumah Sakit dalam hal perencanaan kesehatan</i></p>	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pasal 36 ayat 1 bagian c tentang program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat	<p>Komitmen pemerintah kota untuk melaksanakan kegiatan musrenbang menjadi agenda rutin dan dianggarkan dalam APBD</p> <p>Semua usulan yang disampaikan pada saat musrenbang termasuk legislatif akan dipertimbangkan oleh <i>stakeholder</i> dengan melihat kekuatan APBD dan mempertimbangkan kebutuhan Puskesmas atau Rumah Sakit dan semua usulan dapat dipantau melalui aplikasi online musrenbang</p>

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
3	<b>Negosiasi (Pendekatan Partisipatif)</b>	<b>1. Negosiasi dengan lintas sektor terkait</b>	<p>IMD, 37 th</p> <p>IMD, 37 th</p>	<p><i>negosiasi dengan Bappeda..weh kalau tidak bisa mi ditahapan kami, ditahapan kepala dinas mi dengan Kepala Bappeda.. biasanya yang menjadi kendala kalau ada ubah rincian kegiatan yang sebenarnya menurut kami prioritas, tapi belum terakomidir mau dirubah rincian ya urusannya mi bos sama bos yang bicara biasanya</i></p> <p><i>negosiasi dengan BPKAD...person yang kita dikasi itu bukan level yang bisa ambil kebijakan jadi komunikasinya tidak langsung ke pengambil kebijakannya , .. jadi kalau ada mau ditanyakan/mau rubah rincian anggaran.. kita cuma sampe ditahap kasubidnya.. kalau level ini masalahnya langsung menghadap ke atasan (Kabid Anggaran) jadi ditunggu sampai ada dan bahkan di kejar sampai RS karena ada urusan keluarga atau lagi rapat di provinsi dan biasanya kalau terkendala lagi..Kadis langsung telepon pak Kaban ..pak Kaban ada masalahnya begini anggota ku</i></p>	<p>Kemampuan negosiasi membutuhkan komunikasi yakni teori komunikasi birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi untuk mencapai komunikasi organisasi yg efektif yakni salah satu karakteristiknya hirearki organisasi yang terstruktur</p>	<p>Verifikasi rencana kegiatan merupakan tahapan negoisasi dan apabila ada kendala terkait mengubah rincian kegiatan yang menurut dinkes prioritas akan tetapi belum bisa di akomidir oleh Bappeda sehingga menjadi urusan pimpinan untuk berkoordinasi</p> <p>Tahapan verifikasi anggaran di BPKAD pada level Kasubid apabila ada masalah pada verifikasi terkait perubahan rincian anggaran disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan Kabid bahkan diluar jam kerja dan sampai pada level yang lebih tinggi yakni kepala dinas</p>

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Negosiasi (Pendekatan Partisipatif)</b>	<b>1. Negosiasi dengan lintas sektor terkait</b>	AAZ, 46 th	<i>negosiasi dengan Bappeda pada saat verifikasi anggaran..biasanya kami dinkes diskusi dulu ..misal kalau anggaran terbatas diskusi lagi di bidang..kegiatan apa yang paling urgent.. memang seumpama ada sisa sedikit anggaran yang harus dibagi..kami melihat skala prioritas kegiatan apa yang perlu ditambahkan atau dilaksanakan.. nah setelah itu verifikasi di Bappeda harus diikutsertakan justifikasi atau alasan kenapa sampai muncul lagi kegiatan ini atau penambahan anggaran dari pada kegiatan yang akan dilaksanakan</i>	Permendagri 77 Th 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya dengan mempertimbangan skala prioritas dan justifikasi kegiatan direncanakan kembali	Diskusi dilakukan lingkup dinkes untuk sisa anggaran (SiLPA) tahun lalu dan dianggarkan untuk tahun depan dan saat verifikasi anggaran di Bappeda harus menyertakan alasan kegiatan dianggarkan kembali

No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Negosiasi (Pendekatan Politis)</b>	<b>Bentuk negosiasi dengan legislatif</b>	<p>IMD, 40 th</p> <p>AHI, 42 th</p>	<p><i>negosiasi dengan anggota legislatif di Banggar...woow itu dirapat toh pasti, di forum kan selalu ada rapat komisi, sesudah rapat komisi diangkat ke banggar, setelah dari banggar kembali lagi ke komisi, biasanya ditanya dulu program prioritas, indikator kebutuhan anggaran, ditanya realisasi sebelumnya</i></p> <p><i>kami tanya apa saja indikatornya, kenapa butuh dana sekian, apa alasannya..kalau realistis bisa dijawab dengan baik maka kami Badan Anggaran/legislatif tidak segan-segan untuk mengetok palu menyetujui yang penting valid pelaporannya dan dapat dipertanggung jawabkan .. biasa juga ada yg tidak di acc kalau misal terlalu tinggi penganggarnya lantas kita melihat kekuatan APBD kita berapa.. akan dibahas sebanyak 3 kali rapat (komisi, banggar, komisi) biasa kita pangkas tergantung asas manfaat kepada warga kota Makassar</i></p>	<p>Tahapan kebijakan penetapan anggaran dengan rapat komisi dan rapat Banggar</p> <p>Program disusun disesuaikan dengan indikator program prioritas untuk mendukung SPM Kesehatan</p>	<p>Pembahasan anggaran di DPRD untuk menetapkan besaran anggaran setiap usulan program dibahas melalui rapat komisi kemudian rapat banggar dan kembali lagi ke rapat komisi</p> <p>Penyusunan program disesuaikan dengan indikator program prioritas, kebutuhan anggaran realistis maka akan disetujui oleh DPRD dan sebaliknya anggaran tidak disetujui apabila terlalu tinggi penganggarnya dan berdasarkan asas manfaat kepada masyarakat</p>



No	Variabel	informasi	Informan	Emik	Etik	Konstruksi Konsep
	<b>Negosiasi (Pendekatan Atas Bawah-Bawah Atas)</b>	<b>1. Proses negosiasi Atas Bawah – Bawah Atas</b>	IMD, 40 th	<p><i>selalu diusul yang tidak bisa kami anggarakan, paling sering langganannya kesehatan itu diusulkan posyandu..nah itu posyandu kan UKBM dari dan oleh masyarakat jadi kami akomodir yang sesuai tupoksi..yang tidak ya ditolak.. dan ada aplikasinya itu kalau yang usulan musrenbang jadi bisa juga kita lihat diakomidir kah atau tidak..aplikasinya dikembangkan sm Bappeda</i></p> <p><i>Pada saat verifikasi di Bappeda atau BPKAD apabila ada kendala biasanya oleh Kasubid langsung diarahkan ke Kabid dan apabila tidak menemukan solusi akhirnya kami Dinkes melaporkan hal tersebut ke Kepala Dinas dan menjadi urusan Kepala Dinas dengan Kepala Bappeda ataupun BPKAD</i></p>	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pasal 36 ayat 1 bagian c tentang program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat	Usulan kegiatan sarana posyandu (pembangunan gedung) pada saat musrenbang merupakan kegiatan yang sulit diakomodir oleh dinkes karena merupakan kegiatan UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat) dinkes hanya mengakomodir kegiatan sesuai tupoksi dan usulan dapat di patau melalui aplikasi murenbang yang dikembangkan oleh Bappeda

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN**  
**KOTA MAKASSAR**

Pada hari **Rabu** tanggal **1** bulan **Maret** tahun **2023** telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :  
Hari dan Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023  
J a m : 12.00 WITA  
Tempat : Hotel Claro Makassar

Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023

**MENYEPAKATI**

- KESATU :** Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah;
- KEDUA :** Menyepakati Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA :** Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT :** Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar ini; dan
- KELIMA :** Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RCPD Kota Makassar Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


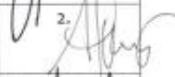
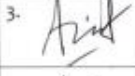
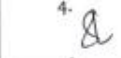

Makassar, 1 Maret 2023



Pimpinan Sidang  
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes

Menyetujui,  
Perwakilan Peserta Forum Perangkat Daerah

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat/No.HP	Tanda Tangan
1.	Hj. Irwawati Sula, SE	Komisi D DPRD Kota Makassar	Jl. A. Pettaruni	1. 
2.	NOPTRADI	Bagpala	Talucung II	2. 
3.	Kartini Ismail	Mst/Perwakilan Kader	Jl. Daga Gau II No. 28 C	3. 
4.	M. Sulham Fotus	HAKLI/organisasi profesi	Perumahan Villa discovery A/3	4. 
5.	Chg. Atik Kemi	Pkm Birn	Jl Prof. Dr Ir Sutarni	5. 

**DAFTAR HADIR PESERTA  
KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR**

Hari / Tanggal : Rabu / 01 Maret 2023

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
			PAGI	SIANG
1	dr. Fredrick P.O	R.S. HERMINA		
2	dr. Amira P. Wahandhu	PKM Tamalauca		
3	dr. Irena Kuswini A	PKM Tamalauca		
4	dr. ROSYANA ABU BAKAR	PKM. ANTANES		
5	MUH GUNTUR SP.2 MAR	DISOAK		
6	dr. Riti Dewi A. M	PKM Putiwi		
7	dr. KHAIRU RIZAL	PKM MACCINI SAWAH		
8	dr. A. IRANA M	PKM Panambungan		
9	dr. YULIAMINGSIH THAWAN	PKM WIRASA UPA		
10	Ap. Muh. Subitomo	PAFI		
11	dr. Hasni	RSUD		
12	dr. Nulman	PKM. Bamsby		
13	dr. Delys Arifuddin	PKM Antais		
14	Hj. Roswita	PTGMI Kota Mks		
15	Ira H	PKM. Layang		
16	dr. DIVE AR	PKM Jongaya		
17	dr. Adwin Haddi P.	PKM Rappokellu		
18	dr. Umrah	PKM namasong		
19	MASTURI	Hk. kec. TALLU		
20	Susanida	Forum Sehat		
21	kasumi pokuni	PKM Lantasa		
22	DAWI YO	PKM Rappokellu		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Program	INDIKATOR KINERJA Keluasan Sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	RENCANA TAHUN 2024			Sumber Dana	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
						Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu	
						Program	Keluasan Sub	Hasil Kegiatan						
	<b>DINAS KESEHATAN</b>							<b>786.395.564.562</b>				<b>816.352.051.175</b>		
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>1 2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													
<b>1 2 1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik					90%		161.366.069.200	APBD	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90%	160.692.056.650
			Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah					100%				Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas					90%				Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%	
<b>1 2 1 1</b>	<b>02.01</b>	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%		637.000.000	APBD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	637.000.000
<b>1 2 1 1 02.01.1</b>		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar		2 Dokumen	2 Dokumen	103.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	103.000.000
<b>1 2 1 1 02.01.2</b>		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	23.000.000	APBD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23.000.000
<b>1 2 1 1 02.01.3</b>		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000
<b>1 2 1 1 02.01.4</b>		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	APBD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000
<b>1 2 1 1 02.01.5</b>		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000
<b>1 2 1 1 02.01.6</b>		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar		2 Laporan	2 Laporan	130.000.000	APBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	130.000.000
<b>1 2 1 1 02.01.7</b>		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan		3 Laporan	3 Laporan	336.000.000	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	336.000.000
<b>1 2 1 1 02.02</b>		<b>02.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>		<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan</b>			<b>100%</b>		<b>134.490.227.600</b>	<b>APBD</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>135.471.277.050</b>
<b>1 2 1 1 02.02.1</b>		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar		2034 Orang/Bulan	14 Dokumen	132.612.924.800	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2034 Orang/Bulan	133.593.974.250
<b>1 2 1 1 02.02.2</b>		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar		13 Dokumen	13 Dokumen	1.287.720.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	13 Dokumen	1.287.720.000
<b>1 2 1 1 02.02.3</b>		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pelaksanaan Akuntansi	Terlaksananya Penatausahaan dan Pelaksanaan Akuntansi	Kota Makassar		12 Dokumen	12 Dokumen	553.878.800	APBD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Dokumen	553.878.800
<b>1 2 1 1 02.02.4</b>		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Kota Makassar		1 Laporan	1 Laporan	18.053.000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	1 Laporan	18.053.000
<b>1 2 1 1 02.02.5</b>		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar		6 Dokumen	6 Dokumen	4.653.000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	4.653.000
<b>1 2 1 1 02.02.6</b>		6	Pengelolaan dan Penyapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dinas Kesehatan		6 Dokumen	6 Dokumen	4.653.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	4.653.000

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kota Makassar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

(1)	Program/ Kegiatan	Masalah	Alamat Lokasi	Berkas/ Dokumen	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Usulan Musrenbang				
1	Pelayanan Penyemprotan (FOGGING) Demam Berdarah Dengue (DBD)	Biasa terjadi wabah malaria di wilayah Kel.Cambaya	Jl .Barukang Utara RW 001, RW 002, RW 003 dan RW 004 Kel.Cambaya Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar	1 Paket	Diakomodir
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang Puskesmas	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ringan Puskesmas di RT 01 RW 02 dibutuhkan rehabilitasi bangunan karena bangunan sudah rusak dan tidak bisa digunakan sehingga dibutuhkan rehabilitasi agar bangunan bisa digunakan kembali untuk kegiatan masyarakat di wilayah Kel.Maricaya Selatan dengan volume panjang 25M x lebar 4,5M	Jalan Kuburan Dadi, Kota Makassar Kel.Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang	1 Paket	Diakomodir
3	Peningkatan Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kelurahan Lembo dengan volume 25 Orang x 2 Angkatan	Jalan Sunu Komp.Unhas Blok CX 1A (Kantor Lurah Lembo) Kecamatan Tallo	1 Paket	Diakomodir
4	Pelayanan Penyemprotan (FOGGING) Demam Berdarah Dengue (DBD)	Banyaknya yang terjangkit DBD maka perlu adanya penyemprotan FOGGING DBD sebanyak 5 paket	Jl. Butung Lr.200 RW 001 Kel.Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar	1 Paket	Diakomodir
	Usulan POKTR				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang Puskesmas	Warga meminta fasilitas di puskesmas maccini lebih diperhatikan	Jl.Maccini Sawah No.6 RT 003 RW 002 Kel.Maccini, Kec.Makassar, Kota Makassar	1 Paket	Diakomodir

### DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN



## DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN





### DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN



## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Murniaty M, SKM
2. Tempat, Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 25 Februari 1985
3. Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 297  
Kelurahan Gunung Sari,  
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Email : [mattaz.new@gmail.com](mailto:mattaz.new@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1991 sd. 1997 : SD Inpres Mangasa Kabupaten Gowa
2. Tahun 1997 sd. 2000 : SMP Negeri 2 Sungguminasa Kab. Gowa
3. Tahun 2000 sd. 2003 : SMA Negeri 3 Makassar
4. Tahun 2004 sd. 2008 : S1 Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi)  
Universitas Hasanuddin Makassar
5. Tahun 2022 : Mahasiswi S2 Administrasi dan Kebijakan  
Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar

### C. PEKERJAAN

1. Tahun 2010 sd. 2013 : CPNS Formasi Umum Tahun 2010  
Puskesmas Karang Rejo, Kota Tarakan,  
Staf Pencegahan & Pengendalian penyakit  
(Program Surveilans dan DBD)
  2. Tahun 2013 sd. 2017 : Dinas Kesehatan Kota Tarakan  
Staf Seksi Pencegahan & Pengendalian  
Penyakit (Program TB & Surveilans PD3I)
  3. Tahun 2017 sd. 2019 : Puskesmas Juata Permai Kota Tarakan,  
Staf Penyuluh Kesehatan dan Pengendali  
Penyakit
  4. Tahun 2020 sd. 2022 : UPT Pelatihan Kesehatan Prov Sulsel  
Staf Analis Perencanaan
  5. Tahun 2023 sd. sekarang : UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan  
Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulsel  
Staf Analis Perencanaan
-